

**ANALISIS REALISASI ANGGARAN RETRIBUSI DALAM MENILAI
KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALEMBANG**

Skripsi



Nama : Triani Mellinda

NIM : 22 2015 152

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

**ANALISIS REALISASI ANGGARAN RETRIBUSI DALAM MENILAI
KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALEMBANG**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Nama : Triani Mellinda

NIM : 22 2015 152

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Triani Mellinda

NIM : 222015152

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima berupa sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 2020

Penulis



Triani Mellinda

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Realisasi Anggaran Retribusi Dalam Menilai
Kinerja Keuangan Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang

Nama : Triani Mellinda
NIM : 22 2015 152
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, 2020

Pembimbing I

Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., AK., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

Pembimbing II

Darmavanti, S.E., AK., M.M., CA
NIDN/NBM : 0219057901/1187172

Mengetahui,
Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., AK., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO :

“Ketika telah melakukan yang terbaik yang kita bisa, maka kegagalan bukanlah suatu yang harus disesalkan, tetapi jadikanlah pelajaran atau motivasi diri”

(Triani Mellinda)

Dengan ridho ALLAH SWT

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ Ibu ku (Maryani) dan Ayah ku (A.Bastomi)*
- ❖ Kakak dan Adik ku*
- ❖ Pembimbing Skripsi ku*
- ❖ Almamaterku.*

PRAKATA



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Analisis Realisasi Anggaran Retribusi Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. Skripsi ini penulis ajukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Penulis sampaikan ucapan terima kasih terutama kepada Allah Swt, Ibuku tercinta (Maryani) beserta Kakak dan Adik ku, serta keluarga ku yang berdo'a dan bantuannya memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Betri Sirajuddin,S.E.,M.Si.,AK.,CA dan Ibu Darmayanti,S.E.,AK.,MM.,CA selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan, motivasi serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada;

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,Ak.,M.Si.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si.,selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Anggrelia Afrida, S.E.,M.Si Selaku Pembimbing Akademik
5. Bapak dan Ibu dosen serta staff administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pihak Dinas Perhubungan Kota Palembang.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun banyak usaha telah penulis lakukan, akan tetapi skripsi ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan dari skripsi ini tetap ada manfaat yang dapat diperoleh. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2020
Penulis

Triani Mellinda

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL DEPAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Retribusi Daerah.....	11
2. Objek Retribusi Daerah.....	11
3. Pengelolaan Retribusi Daerah	14
4. Upaya MeningkatkanPendapatan Retribusi	16
5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17
6. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	18
7. Pengukuran Kinerja.....	19
8. Tujuan Pengukuran Kinerja	20
9. Manfaat Pengukuran Kinerja	21
10. Informasi Yang Digunakan Pengukuran Kinerja.....	22

11. Penilaian Kinerja	24
a. Efektivitas	24
b. Rasio Pertumbuhan	26
B. Penelitian Sebelumnya	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelittian.....	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Operasionalisasi Variabel.....	32
D. Data Yang Digunakan	32
E. Metode Pengumpulan data	33
F. Analisis Data dan Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Hasil Penelitian	37
1. Sejarah Dinas Perhubungan Kota Palembang.....	37
2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Palembang	38
a. Visi	38
b. Misi.....	39
3. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Palembang	39
a. Tujuan.....	39
b. Sasaran	40
4. Kedudukan Dinas Perhubungan Kota Palembang	41
5. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	42
6. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi	45
7. Pengukuran Efektivitas	54
a. Retribusi Terminal.....	55
b. Retribusi Parkir	56
c. Retribusi Jasa ASDP	57
d. Retribusi Izin Trayek.....	58
e. Retribusi PKB	59
8. Perhitungan Rasio Pertumbuhan	60
a. Tahun 2016.....	61
b. Tahun 2017.....	61
c. Tahun 2018.....	62
B. Pembahasan Hasil Penelitian	62
1. Efektivitas.....	62

a. Efektivitas Retribusi Terminal	63
b. Efektivitas Retribusi Parkir	67
c. Efektivitas Retribusi Jasa ASDP	70
d. Efektivitas Retribusi Izin Trayek	73
e. Efektivitas Retribusi PKB	75
2. Rasio Pertumbuhan	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Laporan Realisasi Retribusi Tahun 2016-2018	7
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya.....	30
Tabel III.1Operasionalisasi Variabel	32
Tabel IV.1 Laporan Realisasi Retribusi Terminal Tahun 2016-2018	54
Tabel IV.2 Laporan Realisasi Retribusi Parkir Tahun 2016-2018.....	55
Tabel IV.3 Laporan Realisasi Retribusi Jasa ASDP Tahun 2016-2018	56
Tabel IV.4 Laporan Realisasi Retribusi Izin Trayek Tahun 2016-2018	57
Tabel IV.5 Laporan Realisasi Retribusi PKB Tahun 2016-2018.....	58
Tabel IV.6 Perhitungan Efektivitas Anggaran Retribusi Tahun 2016-2018	59
Tabel IV.6 Laporan Realisasi Retribusi Tahun 2016-2018.....	61
Tabel IV.7 Perhitungan EfektivitasRetribusi Terminal.....	62
Tabel IV.8 Perhitungan EfektivitasRetribusi Parkir	65
Tabel IV.9 Perhitungan EfektivitasRetribusi Jasa ASDP	68
Tabel IV.10 Perhitungan EfektivitasRetribusi Izin Trayek	71
Tabel IV.11 Perhitungan EfektivitasRetribusi PKB	73
Tabel IV.12 Perhitungan Rasio Pertumbuhan	76

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Retribusi
- Lampiran 2 Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 3 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Fotocopy sertifikat AIK
- Lampiran 5 Fotocopy Sertifikat Toefl
- Lampiran 6 Biodata
- Lampiran 7 Lembar Persetujuan Skripsi

ABSTRAK

Triani Mellinda/222015152/2020/Analisis Realisasi Anggaran Retribusi Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang/Akuntansi Sektor Publik/.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui realisasi anggaran retribusi dalam menilai kinerja keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran retribusi Dinas Perhubungan Kota Palembang dilihat dari tingkat efektivitas khususnya retribusi terminal tahun 2016-2018 dengan persentase rata-rata yaitu 27,73% dengan kriteria belum efektif, selanjutnya pada retribusi parkir pada tahun 2016-2018 persentase rata-rata yaitu 54,48% dengan kriteria belum efektif, pada retribusi jasa ASDP untuk periode tahun 2016-2018 sudah tergolong sangat efektif yaitu tingkat rata-rata efektivitas sebesar 109,16%, kemudian pada retribusi izin trayek selama tahun 2016-2018 rata-rata persentase yaitu 83,07% hal ini sudah dikatakan cukup efektif, selanjutnya pada retribusi PKB untuk tahun 2016-2018 sudah tergolong cukup efektif, dengan efektivitas rata-rata yaitu 82,54%. Berdasarkan pengukuran rasio pertumbuhan Dinas Perhubungan Kota Palembang pada tahun 2016 sebesar 0,60%, tahun 2017 sebesar -15,90%, tahun 2018 sebesar 2,54. tahun anggaran 2016-2018 menunjukkan pertumbuhan yang positif, kecuali tahun 2017 mengalami pertumbuhan yang negatif

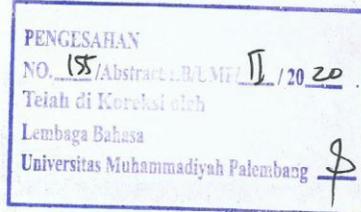
Kata Kunci : anggaran retribusi, efektivitas, rasio pertumbuhan.

ABSTRACT

Triani Mellinda / 222015152/2020 / *An Analysis of Retribution Budgeting Realization in assesing the Financial Performance at the Transportation Agency in Palembang / Public Sector Accounting*

The purpose of this study was to determine the realization of the retribution budgeting in assessing the financial performance at the Transportation Agency, Palembang. The technique used for collecting the data was documentation. The results of this study indicated that: (1) the realization of Transportation Agency in Palembang in term of the effectiveness level, especially in terminal fees from 2016 to 2018 was ineffective yet with an average percentage of 27.73% . Parking fees from 2016 to 2018 was ineffective yet as well with the average percentage of 54.48% . The ASDP service levy for the period 2016-2018 was very effective in the average level of effectiveness of 109.16%, the route permit fees from 2016 to 2018 was quite effective with the average percentage of 83.07% and PKB retribution from 2016 to 2018 was quite effective with an average effectiveness of 82.54%. (2) In term of the Growth Rate, the financial performance of the Palembang City Transportation Department in 2016 was 0.60%, it was 15.90% in 2017, it was 2.54% in 2018 . There was positive growth in the year of 2016 and 2018 but there was negative growth in the year of 2017.

Keywords: retribution budget, effectiveness, growth ratio.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang nomor 9 tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik. Otonomi daerah mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan wewenang dalam melangsungkan aktivitas pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengawasan serta penilaian sesuai peraturan pemerintah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pelayanan dan pembangunan. Otonomi daerah memberikan wewenang secara luas, bertanggung jawab serta proporsional kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan menggunakan sumber daya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Sumber pendapatan daerah yang terpenting salah satunya adalah retribusi daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah. Retribusi

daerah sama halnya dengan pajak daerah yaitu merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah guna memajukan kesejahteraan masyarakat. Retribusi merupakan pemungutan yang dikenakan pada penduduk yang menggunakan jasa tertentu atau fasilitas yang ditawarkan oleh negara jasa tersebut dikelompokkan kedalam tiga golongan yakni jasa usaha, jasa umum, dan jasa perizinan tertentu.

Retribusi Jasa usaha merupakan pemungutan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial baik itu pelayanan dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Retribusi jasa umum merupakan pemungutan terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah guna kepentingan dan kemanfaatan secara umum yang dinikmati dan digunakan oleh orang pribadi maupun badan atau instansi. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pemungutan terhadap pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan yaitu untuk pengaturan , pengendalian serta pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam maupun fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan, dengan demikian masyarakat yang membayar retribusi tersebut akan mendapatkan balasan jasa secara langsung yang tak lain yaitu berupa fasilitas maupun jasa yang ditawarkan

oleh negara tersebut atau bisa dikatakan retribusi mempunyai hubungan secara langsung dengan kembalinya prestasi individu yang telah dibayarkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 pasal 3 ayat 1 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka keuangan daerah patut wajib dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu media untuk menaksirkan pertanggung jawaban dalam sektor publik yaitu memperhatikan suatu kinerja keuangan daerahnya dengan menganalisis perhitungan pencapaian target serta realisasi anggaran baik itu dilihat dari segi outputnya, input, outcome maupun benefitnya.

Mardiasmo (2018 : 168) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan media ukur berhasil atau tidaknya organisasi dalam mencapai tujuannya. Suatu organisasi dikatakan sudah berhasil dalam mencapai tujuannya sesuai dengan target maka organisasi tersebut sudah berjalan secara efektif. Hal utama yang perlu di ingat ialah efektivitas tidak mengemukakan seberapa besar biaya atau anggaran yang sudah dikeluarkan guna menggapai tujuan tersebut. Anggaran bisa melebihi dari yang dianggarkan, bisa jadi lebih dari dua kali yang sudah dianggarkan. Efektivitas hanya memperkirakan apakah suatu aktivitas atau kegiatan organisasi sudah berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Beni (2016: 76-77) menjelaskan bahwa taksiran efektivitas memiliki kriteria yaitu diatas 100% dinyatakan sangat efektif, 90% sampai dengan 100% maka kriteria sudah masuk kategori efektif, 80% hingga 90% dinyatakan cukup efektif, 60% sampai 80% dikategorikan kurang efektif dan kurang dari 60% maka tingkat efektifnya dikatakan tidak efektif.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ayu (2018) yang berjudul Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2014- 2016. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kebumen dengan melihat rasio efektivitas, dan kinerja keuangan dilihat dari rasio kemandirian dan pertumbuhan selama tahun 2014 sampai 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan dilihat dari segi efektivitas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen telah berjalan dengan efektif yaitu tahun 2014 sebesar 102,47%, tahun 2015 sebesar 102,36% dan tahun 2016 sebesar 102,64% sehingga dari tahun 2014 hingga 2016 dikatakan efektif. Dilihat dari rasio pertumbuhan Dinas Perhubungan Kota Palembang tahun 2014 memiliki pertumbuhan yang negatif yakni -0,1%, tahun 2015 memiliki rasio pertumbuhan yang positif yaitu 7,33% dan untuk tahun 2016 juga mengalami rasio pertumbuhan yang positif sebesar 9,41%. Kinerja keuangan dari sisi rasio kemandirian dikatakan tergolong delegatif atau dapat dikatakan sudah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan urusan pekerjaan dinas, hal tersebut dikarenakan rasio kemandirian pada Dinas Perhubungan Kabupaten

Kebumen dari Tahun 2014 hingga tahun 2016 masuk dalam pola delegatif dengan persentase tak terhingga.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Siti (2018) Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pada Dinas Perhubungan Kota Medan. Penelitian sebelumnya ini bertujuan untuk menganalisis realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi pada Dinas Perhubungan Kota Medan untuk tahun 2015 hingga 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari sisi efektivitas pada realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kota Medan untuk tahun 2015 hingga 2017 dikatakan tidak efektif dikarenakan realisasi anggaran yang hendak dicapai masih sangat jauh perbedaannya untuk memenuhi target anggaran yang ditetapkan. pengukuran kinerja dari sisi efisiensi untuk tahun 2015 hingga 2017 realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kota Medan sudah dikatakan cukup efisien, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Medan untuk tahun 2015 hingga 2017 belum mencapai target yang sudah ditentukan.

Terbentuknya Dinas Perhubungan Kota Palembang tidak hanya diikuti perubahan instansional tetapi melainkan tahapan-tahapan instansional yang berawal dari terbentuknya Dinas LLAJ Palembang I yang berubah menjadi Dinas LLAJR untuk Wilayah I dan berubah menjadi Dinas I LLAJR Tingkat II Kodya Palembang lalu berubah menjadi Dinas Perhubungan Kota Palembang. Dinas Perhubungan Kota Palembang dibentuk

sesuai peraturan pemerintah No 9 Tahun 2008 tentang kedudukan, tugas pokok, pembentukan, fungsi dan struktur organisasi dari dinas daerah. Dinas Perhubungan merupakan dinas yang mempunyai tugas dalam menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah sesuai dengan lingkup dan tugasnya. Dinas Perhubungan Kota Palembang merupakan dokumen perencanaan yang memiliki sifat indikasi, program pembangunan sarana dan prasarana masyarakat selama waktu lima tahun.

Tahun 2016 hingga 2018 persentase antara realisasi dengan anggaran penerimaan retribusi pada Dinas Perhubungan Kota Palembang mengalami naik turun atau fluktuasi, berikut adalah tabel realisasi retribusi Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Tabel I.1
Laporan Realisasi Retribusi Dinas Perhubungan Kota Palembang
Tahun 2016-2018

Jenis Penerimaan	2016		2017		2018	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Retribusi Terminal	4.901.400.000	1.998.943.375	1.000.000.000	212.690.000	1.000.000.000	211.538.000
Retribusi Parkir	12.191.000.000	6.907.284.100	10.500.000.000	5.721.444.800	10.000.000.000	5.223.818.800
Retribusi Jasa ASDP	2.000.000.000	2.853.809.800	2.000.000.000	3.469.803.840	37.685.248.010	4.266.115.259
Retribusi Izin trayek	310.000.000	325.565.000	310.000.000	275.575.000	310.000.000	171.375.000
Retribusi PKB	3.954.300.000	3.450.141.500	4.300.000.000	3.384.833.000	4.300.000.000	3.511.685.500
Jumlah	23.356.700.000	15.535.743.775	18.110.000.000	13.064.346.640	53.295.248.010	13.384.532.559

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2019

Berdasarkan tabel I.1 menunjukkan bahwa realisasi retribusi Dinas Perhubungan Kota Palembang tidak pernah mencapai sesuai target yang

ditetapkan. Penyebab tidak tercapainya sesuai target yaitu yang pertama dari sisi retribusi terminal, dapat dilihat bahwa retribusi terminal tidak pernah memenuhi sesuai target dan mengalami penurunan setiap tahunnya. Berdasarkan survei pendahuluan karena adanya peraturan dari kementerian perhubungan No. PM 79 Tahun 2018 tentang penetapan kode terminal penumpang angkutan jalan, menjelaskan bahwa Tipe A yang diambil alih oleh kementerian perhubungan, tipe A ini ada dua terminal yaitu Karya Jaya dan terminal Alang-alang Lebar dimana kedua terminal tersebut merupakan penyumbang terbesar untuk retribusi terminal. Kurangnya transportasi umum khususnya bus antar kota dalam provinsi (AKDP) dan bus angkutan kota antar provinsi (AKAP), sehingga tidak memberikan kontribusi bagi pendapatan retribusi pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Kedua dilihat dari sisi retribusi parkir, dapat dilihat bahwa retribusi parkir tidak tercapai sesuai target dan mengalami penurunan di setiap tahunnya. berdasarkan survei pendahuluan tidak tercapainya sesuai target kurangnya penertiban juru parkir liar yang mendapat keuntungan dan sangat merugikan masyarakat dan pemerintah harus memberikan berupa sanksi yang tegas. Pihak Dinas Perhubungan Kota Palembang tentunya harus menertibkan titik parkir yang tidak mempunyai legilitas sehingga para juru parkir tidak leluasa memanfaatkan lahan untuk menjadikan lahan parkir. Selanjutnya karena adanya pembangunan LRT yang mengakibatkan hilangnya titik parkir atau penutupan titik parkir sepanjang jalur LRT

Ketiga pada tabel I.1 ditahun 2018 retribusi ASDP mengalami penurunan atau tidak mencapai sesuai target disebabkan karena keterlambatan pengesahan Perda retribusi ASDP, Dinas Perhubungan Kota Palembang pada saat ini belum mempunyai dasar hukum yang kuat untuk retribusi dibidang kelautan dan ASDP, khususnya untuk retribusi angkutan batubara. Sehingga retribusi ASDP ini belum mencapai sesuai targetnya.

Keempat pada retribusi izin trayek dilihat pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan karena adanya Perda No. 14 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan transportasi, bahwa harus ada peremajaan kendaraan yang berusia 10 tahun. Khususnya bus kota, hal ini berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 1465 Tahun 2009 tentang penghentian, peremajaan, dan penggantian kendaraan. Pada tahun 2018 khususnya bus kota banyak berakhir masa operasi izin trayek, sehingga retribusi izin trayek tidak bisa di tagih lagi.

Kelima retribusi PKB pada tahun 2017 dan 2018 tidak mencapai sesuai target karena adanya peraturan menteri perhubungan No. PM 133 tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor bahwa khususnya mobil angkutan barang dan angkutan orang boleh melakukan uji fisik atau uji kir di seluruh indonesia. Hal itu mengakibatkan adanya plat kendaraan kota palembang akan tetapi melakukan uji kir di daerah lain, sehingga berkurangnya pencapaian target tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan maka penulis tertarik untuk memahami lebih lanjut mengenai realisasi anggaran retribusi

dalam menilai kinerja Dinas Perhubungan Kota Palembang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Realisasi Anggaran Retribusi Dalam Menilai Kinerja Keuangan Dinas Perhubungan Kota Palembang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah realisasi anggaran retribusi dalam menilai kinerja keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui realisasi anggaran retribusi dalam menilai kinerja keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Memberikan wawasan dan menambah pengetahuan mengenai tingkat efektivitas dan rasio pertumbuhan realisasi anggaran retribusi dalam menilai kinerja keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

2. Bagi Dinas Perhubungan Kota Palembang

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan saran tentang kinerja keuangan realisasi anggaran retribusi Dinas Perhubungan Kota Palembang.

3. Bagi Almamater

Bagi almamater di harapkan bisa menjadi bahan referensi tambahan, menjadikan sebagai acuan bagi penulisan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul.2014.*Akuntansi Keuangan Daerah*.Jakarta:Salemba Empat
- Hanik, Fitri Umi.2014.*Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja Studi Kasus Dinas BPPKAD Kabupaten Semarang*.Jurnal JABPI Vol. 22 No 2,Politeknik Negeri Semarang.
- Mandagi, Novita.2016.*Analisis Kinerja Keuangan Dalam Pengelolaan APBD Pada Dinas Pengelola Keuangan,Pendapatan dan Aset (DKPA) Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Ilmiah Among Makarti Vol.11,No.2,Universitas SAM Ratulangi Manado
- Mahmudi.2016. *Akuntansi Sektor Publik*.Yogyakarta: UII Press
- Mahsun, Mohammad.2013.*Konsep Pengukuran Kinerja Sektor Publik*.Yogyakarta: BPFE
- Mandagi, Novita.2016.*Analisis Kinerja Keuangan Dalam Pengelolaan APBD Pada Dinas Pengelola Keuangan,Pendapatan dan Aset (DKPA) Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Ilmiah Among Makarti Vol.11,No.2,Universitas SAM Ratulangi Manado
- Mardiasmo.2018. *Akuntansi Sektor Publik*.Yogyakarta: ANDI
- Pekei, Beni.2016.*Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi*.Jakarta:Taushia
- Palealu, Alfa Subiakto.2016.*Analisis Penerimaan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Bitung*.Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 16 No 03, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Peraturan Daerah Kota Palembang No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan keuangan daerah
- Peraturan Walikota Palembang No.57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kota Palembang
- Putra, Bobby Fandhi.2014.*Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar*. Jurnal JAB Vol 10 No.1, Universitas Brawijaya Malang.
- Sugiyono.2017. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna.2018. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*.Yogyakarta:Pustakabarupress.
- Siregar, Baldrick.2017.*Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*.Yogyakarta:UPP STIM YKPN
- Ulfa, Siti Mardhiyah.2018.*Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pada Dinas Perhubungan Kota Medan*.Skripsi

Diterbitkan.Fakultas Ekonomi dan Bisnis.Universitas Medan Area:
Medan.

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah